



# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

**DISDUKCAPIL**  
Provinsi Sulawesi Selatan

# 2023



**RAKORNAS**

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023  
TEMA  
PENGUATAN BUDAYA UNTUK PELAYANAN PUBLIK DAN KONSENSIA PEMUDA SERIKEM  
PALEMBANG, 24 - 26 OKTOBER 2023

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan baik yang telah berhasil mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun yang belum mencapai target.

Penyusunan Laporan Kinerja ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja ini telah diuraikan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan beserta analisis capaian selama tahun 2023. Hal ini akan menjadi bahan, guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Makassar, 12 Februari 2024



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE., MT**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660902 198810 1 001

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### Halaman Judul

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii

#### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang .....	1
1.1 Struktur Organisasi .....	2
1.1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia.....	3
1.2. Isu Strategis .....	8
1.2.1 Tujuan .....	9
1.2.2 Sasaran .....	10
1.3. Arah Kebijakan Pembangunan 2023 .....	10
1.4. Isu-Isu Strategis.....	11

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis .....	13
2.2. Perjanjian Kinerja .....	14
2.3. Indikator Kerja Utama .....	15

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja .....	16
3.1. Capaian Organisasi Tahun 2023 .....	17
3.1.1 Sasaran Strategis 1 .....	19
3.1.2 Sasaran Strategis 2 .....	37
3.1.3 Sasaran Strategis 3 .....	52
3.2. Realisasi anggaran .....	66

#### BAB IV PENUTUP

❖ Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	75
❖ Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	76
❖ Lampiran .....	77

## DAFTAR TABEL

### DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dukcapil .....	4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Dukcapil.....	4
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	5
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur .....	6
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan.....	6
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.7 Jumlah Sarana dan Prasarana.....	7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	15
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Tahun 2023.....	16
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	17
Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	19
Tabel 3.2.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja .....	20
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi 3 Tahun Terakhir .....	21
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi 3 Tahun Terakhir Indikator Kinerja .....	21
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Jangka Menengah .....	22
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Jangka Menengah Indikator Kinerja.....	22
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Nasional .....	27
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	29
Tabel 3.9 Analisis Program dan Kegiatan .....	29
Tabel 3.10 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	37
Tabel 3.11 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja .....	38
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi 3 Tahun Terakhir .....	38
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi 3 Tahun Terakhir Indikator Kinerja.....	39
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Jangka Menengah .....	39
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi 3 Tahun Terakhir Indikator Kinerja .....	40
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Nasional .....	40

Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	42
Tabel 3.18 Analisis Program dan Kegiatan .....	43
Tabel 3.19 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	52
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi 3 Tahun Terakhir.....	55
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Jangka Menengah .....	55
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Nasional.....	56
Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	58
Tabel 3.24 Analisis Program dan Kegiatan.....	58
Tabel 4.1 Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja.....	75
Lampiran .....	77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Bentuk dan Susunan Perangkat Dearah. Perda tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pengendalian mobilitas penduduk melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang.

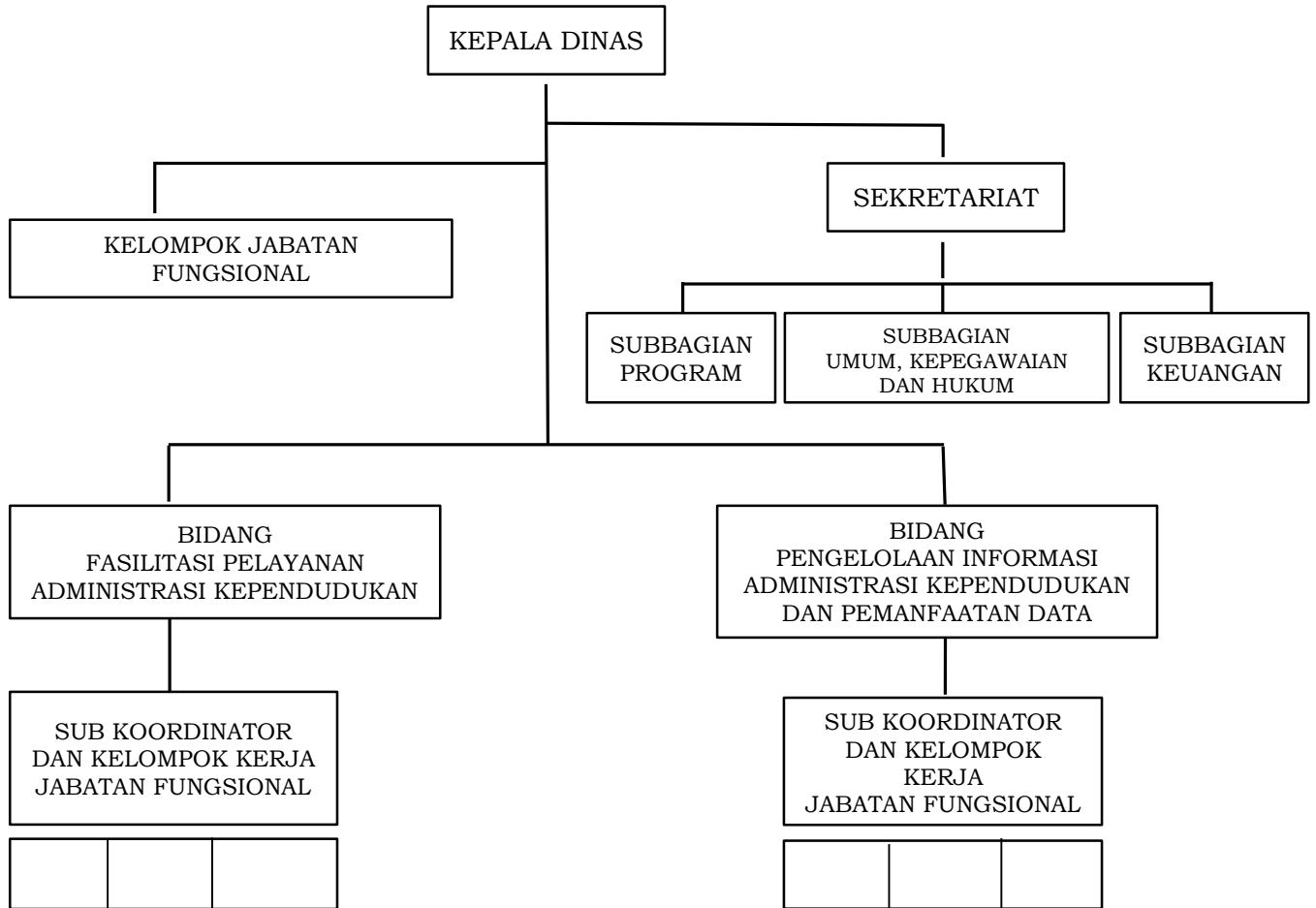
## 1.1. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka jabatan struktural terdiri dari 13 (Tiga Belas) jabatan, dengan rincian 1 (satu) Kepala Dinas, eselon IIA, 1 (satu) Sekretaris, eselon IIIA, 2 (dua) Kepala Bidang, eselon IIIA, dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian eselon IVA, 6 (enam) Sub koordinator.

Dengan demikian, maka susunan organisasi dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas  
Bagian Sekretariat, meliputi :
  - a) Sub bagian Program
  - b) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
  - c) Sub bagian Keuangan
2. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, meliputi:
  - a) Sub Koordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
  - b) Sub Koordinator Fasilitas Bina Aparatur Pencatatan Sipil ; dan
  - c) Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, meliputi :
  - a) Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  - b) Sub Koordinator Kerja Sama, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - c) Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi.
4. Jabatan Fungsional.

**GAMBAR 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



*Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan*

### 1.1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 49 orang Aparatur Sipil Negara yang tersebar pada bidang dan sekretariat dinas.

Berikut ini adalah komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 menurut jenis kelamin, jabatan struktural, golongan dan tingkat pendidikan.



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Tahun 2023**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretariat		1	17	4	22
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan		2	5	3	10
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	5	2	8
5	Jabatan Fungsional Tertentu		3	4	1	8
<b>Total</b>			<b>7</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>49</b>

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023*

Berdasarkan tabel 1.1. diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Pegawai Golongan III sebanyak 31 orang (63,26%) dari total 49 orang pegawai yang ada di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2023**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas					1	1
2	Sekretariat	2		15	5		22
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	1	5	3		10
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1		4	3		8
5	Fungsional		3	4	1		8
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>49</b>

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023*

Berdasarkan tabel 1.2. menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Dukcapil didominasi oleh SDM dengan klasifikasi pendidikan Sarjana Dan Magister. Hal ini sudah cukup baik, mengingat bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas ini umumnya terdiri dari klasifikasi perguruan tinggi.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Tahun 2023**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Dinas							1	1
2	Sekretariat	1	1	3	3	6	6	2	22
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1		2		2	1	4	10
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1		3	3		1	8
5	Jabatan Fungsional Tertentu		2	1	3		2		8
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>49</b>

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023*

Berdasarkan tabel 1.3. rata-rata usia pegawai pada Dinas Dukcapil masih tergolong dalam usia produktif karena hanya memiliki 8 (delapan) orang pegawai dengan usia diatas 50 tahun. Dengan demikian diharapkan produk perencanaan pembangunan dan implementasi dibidang admindukcapil dapat menjadi lebih baik.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan 2023**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	13
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	30
<b>Total</b>		<b>49</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.4. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 3 orang, Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) sebanyak 13 orang dan Fungsional Pelaksana (staf) sebanyak 30 orang.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan 2023**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
		P	L	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	1	1	2
3	Eselon IV	1	2	3
4	Sub Koordinator	4	2	6
5	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	1	3	4
6	Fungsional Pelaksana (Staf)	18	15	33
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>23</b>	<b>49</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.5. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pegawai Laki-laki dan Perempuan tidak jauh berbeda, dimana jumlah pegawai laki-laki sebanyak 23 orang atau 46,93% dan pegawai perempuan sebanyak 26 orang atau 53,07% dari total jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 49 orang.

Adapun perlengkapan Aset/barang inventaris yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Dukcapil Tahun 2023**

No	Unit Wilayah	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	-	1
2	Station Wagon	7	-	-	7
3	Sepeda Motor	3	-	-	3
4	Meja Kerja	7	42	12	61
5	Meja Rapat	9	-	-	9
6	Meja Receptions	1	-	-	1
7	Kursi Kerja	43	-	-	43
8	Kursi Rapat	38	-	-	38
9	Sofa/ Kursi Tamu	2	-	-	2
10	Komputer PC	20	-	-	20
11	Laptop	18	-	-	18
12	Printer	15	-	-	15
13	Lemari	14	-	-	14
14	AC	27	2	-	29
15	Mesin Absensi	1	-	-	1
16	Proyektor	2	-	-	2
17	Sound System	1	-	-	1

Sumber : Laporan Mutasi Barang Semester II 2023

Berdasarkan tabel 1.6. Melihat kondisi sarana dan prasarana perkantoran kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan ,maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang khususnya pada peningkatan kinerja aparatur. Beberapa kekurangan masih terdapat pada beberapa perlengkapan penunjang, seperti komputer PC dan printer. Oleh karena itu, guna mendukung optimalisasi tugas dan

fungsi dinas, maka sarana dan prasarana penunjang diatas perlu dilakukan pengadaan barang sesuai kebutuhan.

## 1.2 ISU STRATEGIS

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 yang *“Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”*.

**Inovatif**, Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang *“bersih dan melayani”*

**Produktif**, Kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang *“sehat dan cerdas”*.

**Kompetitif**, Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang *“mandiri dan sejahtera”*.

**Inklusif**, Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang *“inklusif dan terkoneksi”*

**Berkarakter**, Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang *“berkarakter”*.

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada 4 (empat) fungsi utama pemerintahan, yakni melayani (**services**), membangun (**development**), memberdayakan (**empowerment**), dan mengatur (**regulating**). Berdasarkan fungsi utama tersebut maka dijabarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi tugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara umum tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, sedangkan tugas khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.

Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

### 1.2.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan adalah **“Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat”**

**Berdasarkan** uraian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut

### **1.2.2 SASARAN**

Berdasarkan uraian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Tata Kelola Penduduk dan Pencatatan Sipil;**
- b. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi.**
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;**

### **1.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023**

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat berupa satu arah untuk 5 tahun kedepan, dapat pula satu arah kebijakan dengan tahapan tahun per tahun. Berikut adalah arah kebijakan berdasarkan strategi yang dirumuskan :

1. Menetapkan Produk Hukum terkait Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan.
2. Terfasilitasinya Kabupaten/Kota terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.
3. Peningkatan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.
4. Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala provinsi.
5. Meningkatkan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.

## 1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung terkait dengan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas ditinjau dari : 1). Gambaran pelayanan dinas; 2). Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3). Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota; 4). Implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) bagi pelayanan dinas; dan 5). Implikasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) bagi pelayanan dinas.

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat diproyeksikan isu- isu srategis yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Pemerintah Provinsi. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah:

1. Pemanfaatan data kependudukan yang belum maksimal: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 mengamanahkan bahwa perjanjian kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019, wajib disesuaikan dengan permendagri dimaksud. OPD Provinsi yang telah melakukan perjanjian Kerjasama sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 9 OPD, dan OPD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama sampai dengan saat ini sebanyak 5 OPD, yang dimana capaian persentasenya sebanyak 55.55% ini dikarenakan terbatasnya anggaran serta sarana dan prasarana pada OPD pengguna serta kurangnya pemahaman OPD terkait dengan pentingnya Pemanfaatan data Kependudukan.



2. Pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada Tahun 2024: Berkenaan dengan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang terkait dalam penyiapan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mesti mencermati kondisi tersebut dan mempunyai tanggung jawab yang untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam menyambut pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
3. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya akte kelahiran: Cakupan penerbitan akta kelahiran penduduk Usia 0-17 tahun pada Semester II tahun 2023 baru 98.30%, dan masih dibawah dibandingkan capaian provinsi-provinsi lain di Republik Indonesia. Penyebab masih kurangnya capaian ini karena kesibukan orang tua dan minimnya pengetahuan masyarakat akan persyaratan membuat akta kelahiran, juga karena masih banyaknya akta kelahiran yang sebelumnya telah diterbitkan secara konvensional sehingga belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta hanya akan mengurus apabila diperlukan, misalnya untuk pendaftaran sekolah.
4. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan identitas kependudukan bagi seluruh penduduk khususnya bagi anak kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Data kepemilikan kartu identitas anak untuk tahun 2023 baru mencapai 50,12%. Rendahnya kepemilikan KIA di Sulawesi Selatan disebabkan beberapa Kabupaten/ Kota baru menerapkan KIA pada Tahun 2020.

## BAB III PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Peran strategis diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu yang didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung dan mengantisipasi serta merespon dengan cermat kondisi lingkungan yang terus berubah dengan sangat dinamis. Salah satunya dengan menjamin tercapainya harapan pengelolaan anggaran dengan dasar prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

Rencana Strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana Strategis menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya, membantu perangkat institusi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menyadari pentingnya Rencana Strategis khususnya pada Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik maka pihak-pihak yang terlibat meliputi, pimpinan di semua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, termasuk mitra kerja atau para stakeholder lain secara bersama-sama membangun pemahaman bersama tentang apa, mengapa dan bagaimana Rencana Strategis. Pemahaman yang sama akan membantu mendorong semua pihak berkomitmen dalam mengembangkan arah untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ungkapan lain, pengembangan visi, misi, maksud (*goal*) dan tujuan (*objective*) yang akan dicapai merupakan konsensus dari semua yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Strategis.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil	80%
		Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	81
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik	100%
		Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase Temuan Material	0%

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi Renstra yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja. Masih terdapat indikator yang berupa output, tetapi dinilai sebagai output penting sehingga tetap dimasukkan sebagai IKU. Adapun IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Persentase Tata Kelola Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} + \text{Jumlah KIA yang diterbitkan} + \text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} + \text{Jumlah Anak usia 0 -17 tahun kurang sehari} + \text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
		Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah permohonan perjanjian Kerjasama PKS}}{\text{Jumlah perjanjian Kerjasama PKS yang diterbitkan}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didasari pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja Tahun 2023**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % $\geq$	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

*Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) *semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:*

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

- (2) *semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:*

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

### 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Dalam mencapai suatu keberhasilan kinerja dapat diukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian terhadap IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} + \text{Jumlah KIA yang diterbitkan} + \text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} + \text{Jumlah Anak usia 0 -17 tahun kurang sehari} + \text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	80%	85.07%
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	85	90

	kan skala provinsi	Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama $\frac{\text{Kerjasama}}{100\%} \times$ OPD Provinsi yang telah melakukan perjanjian kerjasama	100%	100%
--	--------------------	--	--	------	------

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 2 (dua) indikator Kinerja Utama. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas **76 % s.d 90 %** atau kriteria **“Tinggi”**.

### 3.2.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023

I

#### Sasaran Strategis 1

#### Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peningkatan pemenuhan dokumen administrasi kependudukan masyarakat merupakan sasaran utama dalam pembangunan sebagai pemenuhan hak konstitusi warga negara dan menciptakan data kependudukan yang akurat. Dengan data yang valid, kualitas perencanaan dalam pembangunan bisa lebih baik, karena penduduk merupakan bagian terpenting dalam suatu negara dilihat dari kuantitas dan kualitas.

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja tahun 2023

Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan diukur melalui 1 Indikator Kinerja yang dimana perbandingan antara target dan realisasi pada indikator Indikator Strategis Satu tersebut dapat di liat pada tabe 3.1.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023**  
**Pada Indikator Sasaran Strategis**

NO	Indikator Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%
1	Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	80%	85,0%	109,31%
<b>Capaian Rata-Rata</b>				<b>109,31%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran 1 Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 1 telah mencapai target kinerja bernilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq 91\%$ .

Adapun Indikator Kinerja dalam mencapai Sasaran Strategis Satu diatas dengan Perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja yang mampu Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diuraikan pada tabel 3.2.2 sebagai berikut:



**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja**  
**Pada Sasaran Strategis Satu**

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	98%	97,26%	99,24%
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	97,26%	99,24%
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	104,78%	104,78%
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%	50,12%	125,3%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	98%	98,30%	100,30%
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	37%	48,32%	130,59%
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	95%	97,62%	102,75%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	90,10%	97,62%	108,34%
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	47%	54,18%	115,27%
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 1 telah mencapai target Karena dari 10 indikator kinerja secara keseluruhan bernilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq 91\%$ , bahkan indikator Persentase Pasangan ber-Akta Nikah mencapai angka 130,59% melebihi target 100%.

## **2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir**

NO	Indikator Sasaran Strategis	2021	2022	2023
1	Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	82.71%	86.27%	85,07%

Pencapaian yang telah diperoleh dari tahun ke tahun untuk sasaran kinerja 1 (satu) menunjukkan hasil yang lebih baik. Terdapat peningkatan dalam capaian target kinerja yang telah ditentukan namun terdapat penurunan di tahun 2023. Berdasarkan data tabel diatas, bahwa dari Indikator target kinerja yang ada telah mencapai target dalam realisasinya.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir pada Indikator Sasaran Satu**

NO	Indikator Kinerja Kunci	2021	2022	2023
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	96,43%	99.42%	97,26%
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96,43%	99.42%	97,26%
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	102,18%	102.77%	104,78%
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	40,14%	54.29%	50,12%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	96,89%	97.47%	98,30%
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	39,52%	39.86%	48,32%
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	96,24%	96.51%	97,62%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	93,99%	96.51%	97,62%
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	49,52%	51.02%	54,18%

10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%
----	-------------------------------------	------	------	------

Berdasarkan pencapaian yang telah diperoleh dari tahun ke tahun dalam indikator kinerja pada sasaran kinerja 1 (satu) menunjukkan hasil yang lebih baik. Terdapat peningkatan dalam capaian target kinerja yang telah ditentukan namun terdapat penurunan di tahun 2023 pada Indikator satu, dua dan empat. Berdasarkan data tabel diatas, bahwa dari Indikator target kinerja yang ada telah mencapai target dalam realisasinya.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah**

NO	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Target	
		2023	Target Jangka Menengah
1	Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	85,07%	-

Pada tabel 3.5 dapat dilihat realisasi target jangka menengah untuk Indikator Sasaran Strategis belum ada dikarenakan untuk target tersebut belum ditetapkan dalam target jangka menengah.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 Jangka Menengah**

NO	Indikator Kinerja Kunci	Realisasi Target	
		2023	Target Jangka Menengah
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	97,26%	98%
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,26%	98%
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	104,78%	100%
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	50,12%	40%

5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	98,30%	98%
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	48,32%	37%
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	97,62%	95%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	97,62%	90,10%
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	54,18%	47%
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%

Target Jangka Menengah dengan 10 indikator pada sasaran satu yang diraih Tahun 2023 menunjukkan nilai yang positif, dimana nilai realisasi telah mencapai nilai target jangka menengah.

**Indikator capaian kinerja yang melampaui target dan mendekati target yang menunjang Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diantaranya adalah:**

1. Indikator Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 98%, sedangkan realisasinya mencapai 97,26% sehingga capaian kinerja sebesar 99,24% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab Tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait kepemilikan KTP-el yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan KTP-el, salah satunya untuk menerima pelayanan publik.

2. Indikator Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 98 %, sedangkan realisasinya mencapai 99.26 % sehingga capaian kinerja sebesar 99,24% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait kepemilikan KTP-el yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, KTP-

el, salah satunya untuk menerima pelayanan publik.

### 3. Indikator Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 100 %, sedangkan realisasinya mencapai 104,78 % sehingga capaian kinerja sebesar 104,78 % dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”** karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab telah tercapainya indikator ini adalah :

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait perekaman KTP mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota senantiasa dihimbau untuk melakukan kegiatan jemput bola guna melakukan perekaman KTP-el di kantong-kantong perekaman seperti sekolah- sekolah, lembaga permasyarakatan atau di tempat lainnya yang dianggap memiliki banyak penduduk belum melakukan perekaman KTP-el atau rentan terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

### 4. Indikator Persentase Penerbitan Kartu Tanda Identitas Anak

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 40 %, sedangkan realisasinya mencapai 50,12% sehingga capaian kinerja sebesar 125,5% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait perekaman KTP mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

### 5. Indikator Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 98%, sedangkan realisasinya mencapai 98,30% sehingga capaian kinerja sebesar 100,30% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”** karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh kerjasama dengan rumah sakit terkait penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan

kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

#### 6. Indikator Persentase Pasangan Ber Akta Nikah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 37%, sedangkan realisasinya mencapai 48,32% sehingga capaian kinerja sebesar 130,59% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran pernikahan dan kepemilikan akta nikah kepada masyarakat terkait Pentingnya Akta Nikah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Kantor Wilayah Agama terkait penerbitan dan pelaporan Akta Nikah.

#### 7. Indikator Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 95%, sedangkan realisasinya mencapai 97,62% sehingga capaian kinerja sebesar 102,75% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Rumah Sakit terkait penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

#### 8. Indikator Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 90,10%, sedangkan realisasinya mencapai 97,62% sehingga capaian kinerja sebesar 108,34% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**". Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat dan melakukan kerja sama kepada rumah sakit terkait

pentingnya penerbitan akta kelahiran khususnya bayi yang baru lahir sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

#### 9. Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 47%, sedangkan realisasinya mencapai 54,18% sehingga capaian kinerja sebesar 115,27% dan dapat dimasukkan dikategori “**Sangat Tinggi**”. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memberikan inovasi layanan kepada masyarakat terkait Kepemilikan akta kelahiran mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

#### 10. Persentase Penerbitan Akta Kematian

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 100%, sedangkan realisasinya mencapai 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan dapat dimasukkan dikategori “**Sangat Tinggi**”. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memberikan inovasi layanan kepada masyarakat terkait Kepemilikan akta kematian serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan Nasional**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Target	
		2023	Target Nasional
1	Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	85,07%	-

Pada tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional ini tidak terdapat

realisasi capaian target nasional dikarenakan untuk target nasional belum ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa Kegiatan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Kegiatan Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk Tahun 2023, adapun tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan efektifitas dan kemampuan terhadap pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat oleh aparat pelayanan di Kabupaten/Kota serta menjamin akurasi data kependudukan di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diharapkan dapat tercapainya tertib administrasi kependudukan.
- Kegiatan Penataan Tata Kelola Pendaftaran Penduduk Skala Provisinsi adapun tujuan pelaksanaan :
  - Meningkatkan pengetahuan dan strategi serta tata cara pengelolaan administrasi pada aparatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab/Kota tentang penataan Tata Kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi.
  - Meningkatkan pemahaman dan Kemampuan aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota yang menangani Pendaftaran Penduduk.
  - Menyamakan pemahaman dan persepsi serta kemampuan aparat dalam menyelenggarakan tata kelola Administrasi kependudukan terutama yang terkait pendaftaran penduduk.
- Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil Skala Provinsi, adapun tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam meningkatkan SDM Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta lapisan masyarakat tentang regulasi dan penitngnya Administrasi Kependudukan bagi pelayanan public sehingga dapat tercapai tertib Administrasi Kependudukan.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, adapun tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari apa yang telah ditargetkan dalam pelaksanaan program kegiatan dinas kependudukan dan pencayatan sipil pada 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan



Pelaksanaan kinerja tahun 2023 terdapat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu :1). Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk; 2). Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3). Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); 5). Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran; 6). Persentase Pasangan ber-Akta Nikah; 7). Persentase Penerbitan Akta Kelahiran; 8). Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran; 9). Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran; 10) Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan.

Adapun Kegagalan dalam mencapai Sasaran Indikator Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu terdapat pada Indikator Kinerja Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang targetnya sebesar 98% dan capaian realisasi sebesar 97,26% dimana penyebabnya tingginya pemilih pemula di Tahun 2023 yang berumur 17 Tahun wajib KTP-el dan disisi lain keterbatasan blangko di seluruh daerah tidak memadai/kekurangan sehingga capaian penerbitan KTP-el tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp **436,203,700** dengan realisasi sebesar Rp **428,145,700** atau **98,15%** dengan capaian kinerja sasaran sebesar **109,31%** maka terjadi efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebesar **11,37%**.

<p><i>Rumus Efisiensi Sumber Daya</i></p>	$\frac{(\% \text{Capaian Kinerja} - \% \text{Serapan Anggaran})}{\% \text{Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$
---	---

**Tabel 3.8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023	REALISASI	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	161,182,400	160,511,156	99,58%
2	Program Pencatatan Sipil	275,021,300	267,634,544	97,31%
	<b>Jumlah</b>	<b>436,203,700</b>	<b>428,145,700</b>	<b>98,15%</b>

Dalam pencapaian Analisis atas Efisiensi Sumber Daya sesuai dengan tabel di atas dalam mencapai Sasaran Strategis Satu yaitu Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terlihat capaian realisasi anggaran dengan mengelola 2 Program dengan total realisasi sebesar **98,15%** dengan capaian kinerja sasaran sebesar **109,31%** maka menghasilkan efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebesar **11,37%**.

#### **7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023**

Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja khususnya Indikator pada Sasaran Strategis Satu yaitu Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Tahun 2023**

No	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	100%	100%
		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100%	100%
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100%	100%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	100%	100%
		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Satu yaitu Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengelola 2 Program, 5 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tabel diatas tercapai dengan persentase rata-rata 100%.

#### 1. Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Sasaran Strategis Satu, Indikator Program Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Terdapat target indikator **Persentase Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk** dan **Persentase Penerbitan KTP** tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, dikarenakan tingginya pemilih pemula di tahun 2023 yang berumur 17 tahun wajib KTP, namun disisi lain keterbatasan blangko KTP di seluruh daerah tidak memadai/kekurangan sehingga capaian penerbitan KTP tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Keterbatasan anggaran yang diberikan, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran program kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Terdapat *refocusing* anggaran sehingga mempengaruhi target capaian kinerja perangkat daerah dan tidak optimalnya penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Keterbatasan anggaran di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24 Kabupaten/kota khususnya anggaran pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan.
5. Masih terdapat di beberapa kabupaten/kota yang indikator kinerjanya yang sesuai dengan Renstra dan Renja masih rendah, di antaranya terkait capaian Akta Kelahiran dan Cakupan Kepemilikan KIA sehingga dapat mempengaruhi nilai agregat dari capaian target indikator tersebut.
6. Keterbatasan anggaran dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan, sehingga mampu memberikan fasilitasi ke 24 kabupaten/kota yang masih memiliki keterbatasan alat pelayanan dengan harapan pemberian layanan administrasi kependudukan bagi 24 kabupaten/kota dapat meningkat dan mempengaruhi target kinerja yang lebih baik.

## 2. Rekomendasi

Terkait dengan kendala pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan peningkatan kinerja ditahun mendatang melalui berbagai upaya antara lain:

1. Melakukan koordinasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri selaku penyedia blangko KTP dengan memastikan kebutuhan blangko KTP di daerah khususnya di 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terpenuhi sesuai dengan jumlah kebutuhan berdasarkan perekaman atau *Print Ready Record* (PRR).
2. Dukungan anggaran dalam peningkatan Program dan Kegiatan serta memperhatikan yang menjadi prioritas OPD agar Pelaksanaan Program dan Kegiatan bisa berjalan secara optimal dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.
3. Mempertimbangkan dan memperhatikan terkait penyesuaian atau refocusing anggaran yang berdampak pada target kinerja dan jalannya kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan koordinasi kepada 24 kabupaten/kota dalam memaksimalkan sarana dan prasarana yang dapat difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Berkoordinasi kepada kabupaten/kota yang capaian kinerjanya masih rendah dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.
6. Memaksimalkan dukungan anggaran Disdukcapil Provinsi untuk memastikan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana seperti Tinta Printer KTP-el, Printer KTP-el, Satu Set Alat Perekaman, dan Mobil Pelayanan yang dapat memaksimalkan pelayanan di daerah terpencil dan daerah perbatasan.

Dokumentasi yang menunjang Keberhasilan pada Indikator Sasaran Strategis Satu Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut

**Dokumentasi Program Kegiatan Sasaran I :**

*Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Tanggal 8-10 Juni 2023*



( Rakornas tgl 24-26 oktober 2023 ) di Palembang



*Rapat Evaluasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Administrasi Kependudukan Tahun 2023*



*Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el di Kabupaten Pinrang Tahun 2023*

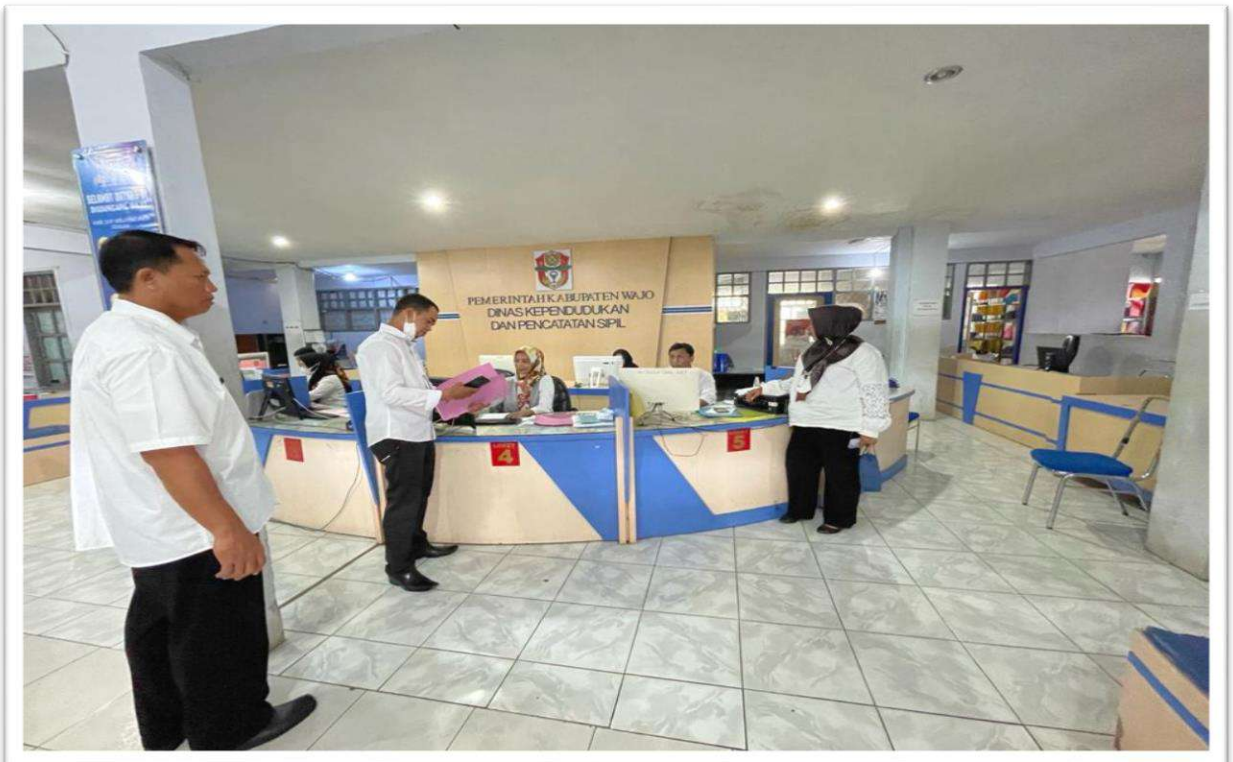




Melaksanakan tugas dalam rangka melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Sidrap 9 Maret 2023.



Melaksanakan tugas dalam rangka melakukan pembinaan, dan evaluasi pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Wajo 21 Juni 2023.



### 3.1.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023

II

## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi

Salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui pemanfaatan data kependudukan skala provinsi adalah untuk menunjang pelayanan publik dalam rangka membangun *Big Data* yang berbasis data kependudukan menuju satu data Indonesia, untuk mewujudkan hal ini perlu kerja keras dan inovasi dari setiap instansi yang menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mengajak OPD ataupun Lembaga berbadan hukum lainnya agar dapat bekerja sama dan memanfaatkan data kependudukan sebagai data dasar dalam melakukan pelayanan. Data kependudukan yang terintegrasi inilah yang diharapkan akan digunakan untuk peningkatan dan percepatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data” dan “Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan” diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data	85	90	105,88%
2	Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%
<b>Capaian Rata-Rata</b>				<b>102,94%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran Dua Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja dua telah mencapai target sesuai dengan tabel diatas karena dari 2 indikator kinerja secara keseluruhan bernilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq 91\%$ .

Adapun Indikator Kinerja Kunci dalam mencapai Sasaran Strategis Dua diatas dengan Perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja yang mengampu Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Keoendudukan Skala Provinsi diuraikan pada tabel 3.11 sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala Provinsi	100%	100%	100%
2	Persentase penyediaan profil kependudukan	100%	100%	100%
<b>Capaian Rata-Rata</b>				<b>100%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Kinerja Persentase ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala Provinsi dan Persentase penyediaan profil kependudukan dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja dua telah mencapai target Karena dari 2 indikator kinerja secara keseluruhan bernilai sangat tinggi dengan nilai ≥ 91%.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir**

No	Indikator Sasaran Strategis	2021	2022	2023
1	Indeks kepuasan pemanfaatan data	96.88	91.41	90
2	Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%

Realisasi capaian indeks kepuasan pemanfaatan data Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja Kunci	2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala Provinsi	100%	100%	100%
2	Persentase penyediaan profil kependudukan	100%	100%	100%
<b>Capaian Rata-Rata</b>				<b>100%</b>

Realisasi capaian kinerja Persentase ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala Provinsi dan Persentase penyediaan profil kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sudah mencapai yang telah ditetapkan.

**3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Perbandingan realisasi indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi Tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan Jangka Menengah**

NO	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Target	
		2023	Target Jangka Menengah
1	Indeks kepuasan pemanfaatan data	90	85
2	Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%

Realisasi Target Kinerja Tahun 2023 untuk indikator indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi adalah 90 dan Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan adalah 100%, jika dengan target jangka menengah maka nilai realisasi 2023 sudah mencapai target.

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja Kunci	2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala Provinsi	100%	100%	100%
2	Persentase penyediaan profil kependudukan	100%	100%	100%
<b>Capaian Rata-Rata</b>				<b>100%</b>

Realisasi capaian kinerja Persentase ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala Provinsi dan Persentase penyediaan profil kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

**4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 perencanaan strategis dan standar nasional.**

Perbandingan realisasi indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi Tahun 2023 dengan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan Nasional**

NO	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Target	
		2023	Target Nasional
1	Indeks kepuasan pemanfaatan data	91.41	-
2	Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	-

Pada tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional ini tidak terdapat realisasi capaian target nasional dikarenakan untuk target nasional belum ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa Kegiatan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, Data Agregat dan data pribadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 di Kab/Kota terkait sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan, agar dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah yang memberikan pelayanan publik dengan sasaran Pengenalan dan penerapan jaringan tertutup (VPN) untuk keamanan data di 24 Kab/Kota di Sulawesi Selatan agar keamanan data pribadi dapat terjaga dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan agar bisa lebih maksimal.
- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Agregat dan Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2023, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kependudukan di kab/kota, terkait dengan pengelolaan dan penyajian data kependudukan agar dapat terlaksana dengan baik oleh lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik, dengan sasaran pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta meningkatkan pelayanan publik agar bisa lebih maksimal.
- Kegiatan Bimbingan Teknis Inovasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai salah satu bimbingan teknis dalam menambah wawasan serta *sharing* pengalaman dan inovasi lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga target Nasional dapat segera tercapai dan mampu meningkatkan pemahaman serta kompetensi dalam hal pengembangan dan inovasi pada penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2023, adapun tujuan kegiatan ini untuk melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 di Kab/Kota terkait informasi

Administrasi Kependudukan, agar dapat terlaksana dengan baik oleh lembaga pemerintah yang melakukan pelayanan publik dengan sasaran agar sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan dengan implementatif dan meningkatkan pelayanan publik agar lebih maksimal.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Kabupaten/Kota terkait dengan beberapa kegiatan diatas.

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) Program sebesar Rp. 243,805,200,00 dengan realisasi sebesar Rp 239,648,920,00 atau **98,22%** dengan capaian kinerja sasaran sebesar **102,94%** maka efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **4,80%**.

$$\text{Rumus Efisiensi Sumber Daya} = \frac{(\% \text{Capaian Kinerja} - \% \text{Serapan Anggaran})}{\% \text{Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$

**Tabel 3.17**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	150,059,800,00	145,849,620,00	97,19%
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	93,745,400,00	93,619,300,00	98,87%
	<b>Jumlah</b>	<b>243,805,200,00</b>	<b>239,648,920,00</b>	<b>98,22%</b>

Dalam pencapaian atas Efisiensi Sumber Daya sesuai dengan tabel di atas dalam mencapai Sasaran Strategis Dua yaitu Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi terlihat capaian realisasi anggaran dengan mengelola 2 Program dengan total realisasi sebesar **98,12%** dengan capaian kinerja sasaran sebesar **102,92%** maka dengan efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebesar **4,80%**.

## 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja khususnya Indikator pada Sasaran Strategis Dua yaitu Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.18 sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Tahun 2023**

No	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	100%
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan	100%	100%

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Dua yaitu Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi yang mengelola 2 Program, 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tabel di atas tercapai dengan persentase rata-rata 100%.

### 1. Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi Sasaran Strategis Dua, Indikator Program Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran yang diberikan, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran program kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Terdapat *refocusing* anggaran sehingga mempengaruhi target capaian kinerja perangkat daerah dan tidak optimalnya penyelenggaraan pelaksanaan program



- kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Keterbatasan anggaran di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24 Kabupaten/kota khususnya anggaran pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan publik.
  4. Capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil pada 24 kabupaten/kota belum sepenuhnya tercapai, terlebih khusus terkait capaian IKD yang targetnya 25% dari jumlah perekaman penduduk, hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai serta letak geografis yang sulit dijangkau.
  5. Keterbatasan anggaran dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan sehingga mampu memberikan fasilitasi ke 24 kabupaten/kota yang masih memiliki keterbatasan alat pelayanan dengan harapan pemberian layanan administrasi kependudukan bagi 24 kabupaten/kota dapat meningkat dan mempengaruhi target kinerja yang lebih baik.
  6. Masih kurangnya capaian Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri 18 Tahun 2021 dan menjadi target kinerja Ditjen Dukcapil Kemendagri serta target dalam Renstra Dukcapil, yang mana masih kurangnya minat Perangkat Daerah untuk memanfaatkan Data Kependudukan sebagai dasar dari pelayanan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keterbatasan anggaran bagi Perangkat Daerah/Pengguna dalam pengadaan sertifikasi ISO 20071 tentang keamanan data, yang mana sertifikasi ISO tersebut salah satu persyaratan utama dalam melakukan perjanjian kerjasama untuk memanfaatkan data kependudukan.

## **2. Rekomendasi**

Terkait dengan kendala pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan peningkatan kinerja ditahun mendatang melalui berbagai upaya antara lain:

1. Dukungan anggaran dalam peningkatan Program dan Kegiatan serta memperhatikan yang menjadi prioritas OPD agar Pelaksanaan Program dan Kegiatan bisa berjalan secara optimal dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.
2. Mempertimbangkan dan memperhatikan terkait penyesuaian atau refocusing anggaran yang berdampak pada target kinerja dan jalannya kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi kepada 24 kabupaten/kota dalam memaksimalkan sarana dan

prasarana yang dapat difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Melakukan koordinasi kepada 24 kabupaten/kota untuk bersama-sama melakukan jemput bola dalam melakukan aktivasi IKD di lokasi yang sulit dijangkau dengan difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Melakukan koordinasi kepada kabupaten/kota yang capaian kinerjanya masih rendah dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.
6. Dukungan kepala daerah baik ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan partisipasi perangkat daerah dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel untuk memanfaatkan data kependudukan dalam meningkatkan pelayanan publik, serta dukungan anggaran bagi perangkat daerah dalam memenuhi persyaratan kelengkapan sertifikat ISO 20071 tentang keamanan data agar perangkat daerah mendapatkan akses untuk memanfaatkan data kependudukan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kerjasama.

Dokumentasi yang menunjang keberhasilan Indikator Indeks kepuasan pemanfaatan data dan Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai berikut:

## Dokumentasi Kegiatan Sasaran Strategis II

Tanggal 9-20 Juni Tahun 2023 Melakukan Aktivasi IKD di Lingkup OPD Sulsel di ruang pola Kantor Gubernur.



Tanggal 26 Juli Tahun 2023 Melakukan Sosialisasi Penggunaan dan Aktivasi IKD di Lingkup OPD Sulsel Dinas TPH-BUN



*Tanggal 23 November Tahun 2023 Melakukan Sosialisasi Penggunaan dan Aktivasi IKD di Kantor Wilayah Bank SulselBar*



*Tanggal 30 September Tahun 2023 Sosialisasi IKD bagi lembaga keuangan dan lembaga penyelenggara pemilu lingkup wilayah Sulsel*



*Monitoring dan Evaluasi Terkait Penyediaan Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap 13-15 September 2023*



*Monitoring dan evaluasi Tentang Perkembangan Pemanfaatan Data serta jumlah akses Web Portal/DWH pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur 12-14 April 2023*



*Monitoring dan Evaluasi Terkait Pemutakhiran Data Pemilih Pemula untuk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru 20-21 September 2023.*



*Pembinaan Pengelolaan serta Penyajian Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo 12-14 April 2023.*





### 3.1.3 CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023

III

#### Sasaran Strategi 3

#### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah menjadi suatu hal penting dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menerus dilakukan, mulai dari menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, sistem monitoring dan evaluasi sampai kepada penyusunan indikator kinerja. Indikator tercapainya sasaran 3 (tiga) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu :1). Nilai SAKIP OPD; 2). Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik; 3). Rata-Rata Capaian Kinerja Daerah; dan 4). Persentase Temuan Material. Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis Tiga yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai sakis OPD	81	78,75 (capaian 2022)	97,22%
2	Persentase Temuan Material	0%	0%	0%
3	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	96,42%	96,42%

4	ASN Nilai SKP Kategori baik dan sangat baik	100%	100%	100%
<b>Capaian Rata-Rata</b>				<b>99,30%</b>

Pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang mencapai target dan mendekati dari apa yang telah ditargetkan, diantaranya adalah:

#### 1. Indikator Nilai SAKIP OPD

Indikator Nilai sakin OPD, pada tahun 2023 masih belum memperoleh nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Kesesuaian antara rencana strategis dan rencana kerja SKPD yang direncanakan dalam perjanjian kinerja menjadi salah satu indikator tercapainya kinerja. Selain itu kemampuan SDM yang bertanggung jawab dalam penanganan SAKIP yang masih perlu ditingkatkan serta didukung oleh komitmen OPD untuk memperbaiki Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP.

#### 2. Indikator Persentase Temuan Material

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 0% sedangkan realisasinya telah mencapai 0%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Dalam pelaksanaannya di tahun 2023 tidak ditemukan temuan material karena pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun 2023 tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu koordinasi yang dilakukan dengan stakeholder terkait yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan juga senantiasa dilaksanakan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan. pelaksanaannya selalu mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan serta senantiasa melakukan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian pencapaian target dapat terealisasi dengan capaian 100% pada akhir tahun 2023

### 3. Indikator Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 96,42%, sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini hampir mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tidak tercapainya indikator ini adalah:

dikarenakan terdapat anggaran dari belanja pegawai yang melebihi dan terdapat belanja yang tidak sesuai dengan nilai yang ada dipasaran, serta beberapa belanja yang memiliki sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan karena sudah sesuai dengan volume yang telah ditetapkan sehingga realisasi keuangan tidak mencapai 100% namun untuk realisasi fisik dalam menunjang program kegiatan terealisasi 100%.

### 4. Indikator Persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2023 adalah 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 100%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Bahwa semua ASN telah melakukan tugas pokok dan fungsi secara optimal sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi yang profesional dan bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 1 (satu) telah mencapai target, dari empat indikator kinerja yang ada, ketiganya telah mencapai nilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq 91\%$ , bahkan mencapai target 99,30%. Namun dari keempat indikator kinerja yang ada masih terdapat satu indikator yang belum memiliki nilai yang disebabkan belum keluarnya hasil penilaian atas evaluasi nilai SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

## **2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja pada sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Antara Realisasi 3 tahun terakhir**

No	Indikator Sasaran Kinerja	2021	2022	2023
1	Nilai SAKIP OPD	77.95	78,75	-
2	Persentase Temuan Material	0%	0%	0%
3	Rata-rata capaian kinerja daerah	100%	100%	100%
4	Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik dan sangat baik	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian yang telah diperoleh dari tahun ke tahun untuk sasaran kinerja 3 (tiga) menunjukkan hasil yang lebih baik. Terdapat peningkatan dalam capaian target kinerja yang telah ditentukan. Berdasarkan data tabel diatas, bahwa dari keempat target kinerja yang ada terdapat tiga indikator kinerja yang telah mencapai target dalam realisasinya. Sedangkan untuk indikator Nilai sakip OPD, pada tahun 2023 masih belum memperoleh nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

**3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Perbandingan realisasi Indikator pada sararan tiga Tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target	
		2023	Target Jangka Menengah
1	Nilai SAKIP OPD	78,75	81
2	Persentase Temuan Material	0%	0%
3	Rata-rata Capaian Kinerja Daerah	100%	100%
4	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%

Realisasi Target Kinerja Tahun 2023 untuk indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat tiga indikator yang telah tercapai 100% jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka nilai realisasi

2023 sudah mencapai target, namun terdapat satu indikator yang realisasinya belum mencapai target.

**4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Perencanaan Strategis dan Standar Target Nasional.**

Perbandingan realisasi Indikator pada sararan tiga Tahun 2023 dengan target Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan Target Nasional**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target	
		2023	Target Nasional
1	Nilai SAKIP OPD	75	-
2	Persentase temuan material	0%	-
3	Rata-rata Capaian Kinerja Daerah	100%	-
4	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%	-

Pada tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional ini tidak terdapat realisasi capaian target nasional dikarenakan untuk target nasional belum ditetapkan oleh pemerintah pusat.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa Kegiatan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai berikut :

- Mengikuti Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta Tanggal 23 s.d 24 April Tahun 2023, adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini agar tiap OPD dapat melakukan sinkronisasi dan kesamaan persepsi dalam penentuan sasaran kegiatan pada penetapan perjanjian kinerja.
- Rapat Koordinasi Teknis Dan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, adapun tujuan dari kegiatan rapat koordinasi teknis dan evaluasi kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi sulawesi selatan adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Melaksanakan Rapat Internal Dinas Membahas terkait dengan penentuan Sasaran Kegiatan yang akan dituangkan pada Perjanjian Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi.
- Membuat Laporan Capaian Evaluasi Kinerja baik Perbulan, Pertriwulan, Semester dan Pertahun agar dapat mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan dan capaian kegiatan.
- Melakukan Rapat dan Sosialisasi terkait dengan pengisian dan penentuan Indikator Kinerja SKP yang dimana menjadi Narasumber dari BKD Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) Program sebesar Rp. 9,701,099,410,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9,341,624,676,00 atau **96,29%** dengan capaian kinerja sasaran sebesar **100%**. Maka efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **3,85%**.

$$\text{Rumus Efisiensi Sumber Daya} = \frac{(\% \text{Capaian Kinerja} - \% \text{Serapan Anggaran})}{\% \text{Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$

**Tabel 3.23**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9,701,099,410,00	9,341,624,676,00	96,29%
	<b>Jumlah</b>	<b>9,701,099,410,00</b>	<b>9,341,624,676,00</b>	<b>96,29%</b>

Dalam pencapaian atas Efisiensi Sumber Daya sesuai dengan tabel di atas dalam mencapai Sasaran Strategis Tiga yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah terlihat capaian realisasi anggaran dengan mengelola 1 Program dengan total realisasi sebesar **96,29%** dengan capaian kinerja sasaran sebesar **100%**. Maka efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **3,85%**.

**7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2023**

Dalam pelaksanaan program kegiatan untuk menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja khususnya Indikator pada Sasaran Strategis Tiga yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.24 sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
**Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Tahun 2023**

No	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 unit	35 unit

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Satu yaitu Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi yang mengelola 1 Program, 7 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tabel diatas tercapai dengan persentase rata-rata 100%.

### 1. Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Capaian Sasaran Strategis Tiga, Indikator Program Kegiatan serta Realisasi Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Terdapat target pada indikator **Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah** yang tidak tercapai sesuai dengan apa yang ditargetkan, dikarenakan terdapat anggaran dari belanja pegawai yang melebihi dan terdapat belanja yang tidak sesuai dengan nilai yang ada dipasaran, serta beberapa belanja yang memiliki sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan karena sudah sesuai dengan volume yang telah ditetapkan sehingga realisasi keuangan tidak mencapai 100%.
2. Keterbatasan anggaran yang diberikan, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran program kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Terdapat *refocusing* anggaran sehingga mempengaruhi target capaian kinerja perangkat daerah dan tidak optimalnya penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Keterbatasan anggaran di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24 Kabupaten/kota khususnya anggaran pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan publik.
5. Keterbatasan anggaran dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan sehingga mampu memberikan fasilitasi ke 24 kabupaten/kota yang masih memiliki keterbatasan alat pelayanan dengan harapan pemberian layanan administrasi kependudukan bagi 24 kabupaten/kota dapat meningkat dan mempengaruhi target kinerja yang lebih baik.



## 2. Rekomendasi

Terkait dengan kendala pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan peningkatan kinerja ditahun mendatang melalui berbagai upaya antara lain:

1. Memperhatikan kembali dalam penyusunan anggaran belanja khususnya kebutuhan belanja pegawai dan memastikan nilai harga yang dibutuhkan sesuai dengan harga yang ada dipasaran sehingga penyusunan anggaran dapat berjalan secara optimal.
2. Melakukan koordinasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri selaku penyedia blangko KTP dengan memastikan kebutuhan blangko KTP di daerah khususnya di 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terpenuhi sesuai dengan jumlah kebutuhan berdasarkan perekaman atau sisa *Print Ready Record* (PRR).
3. Dukungan anggaran dalam peningkatan Program dan Kegiatan serta memperhatikan yang menjadi prioritas OPD agar Pelaksanaan Program dan Kegiatan bisa berjalan secara optimal dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.
4. Mempertimbangkan dan memperhatikan terkait penyesuaian atau *refocusing* anggaran yang berdampak pada target kinerja dan jalannya kegiatan yang telah ditetapkan.
5. Melakukan koordinasi kepada 24 kabupaten/kota dalam memaksimalkan sarana dan prasarana yang dapat difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Dokumentasi yang menunjang keberhasilan Indikator Nilai Sakip OPD, Persentase temuan material, Rata-rata Capaian Kinerja Daerah dan, Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik sebagai berikut:

**Dokumentasi Kegiatan Sasaran Strategis III :**

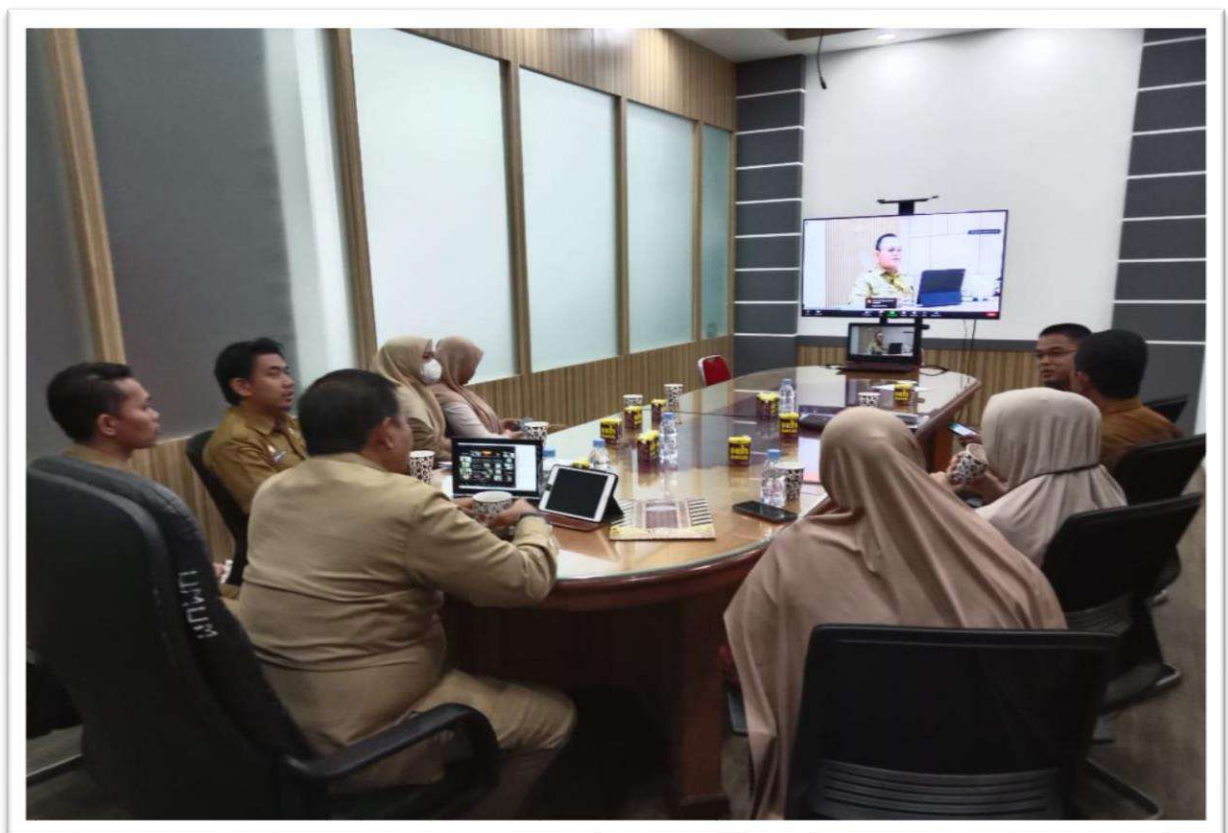
**Rapat Komisi A DPRD Prov.Sulsel Terkait RKA dan DPA Tahun 2023**



*Rapat Evaluasi SAKIP Tahun 2023 di Aula Inspektorat Prov.Sulsel*



*Melakukan Rapat Internal Terkait dengan Penyusunan SKP Tahun 2023*



*Rapat Zoom Terkait dengan Perencanaan SIPD-RI Tahun 2024*



*Rapat BMD ( Barang Milik Daerah ) Tahun 2023*



*Sosialisasi Penyusunan Anjab / ABK Tahun 2023*



*Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 Dukcapil se Sulsel*



*Sosialisasi Penyusunan Anjab / ABK Tahun 2023*



*Mengikuti Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 terkait dengan Pertanggung Jawaban Bendaharan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov.Sulsel Tahun 2023*



### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan anggaran APBD yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) di tahun 2023 dengan nilai sebesar **Rp. 10.381.108.310,-** dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 10.009.239.296,-** atau sebesar **96.42%**. Adapun penjabaran dari belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi: dianggarkan sebesar **Rp.10.076.142.310,-** dan direalisasikan sebesar **Rp.10.009.239.296,-** atau sebesar **96,42%** dari yang dianggarkan.
2. Belanja Modal: dianggarkan sebesar **Rp. 304.966.000,-** dan direalisasikan sebesar **Rp. 276.758.693,-** atau mencapai **90.75%** dari yang dianggarkan.

Adapun Realisasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang mana **mengelola 5 Program, 16 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**LAPORAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK	
				(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0%	0	9,701,099,410	9,341,624,676	96.29	100.00
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	96,42%				
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100				
	<b>Kegiatan</b>							
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>245,290,800</b>	<b>241,647,768</b>	<b>98,51</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	124,897,800	121,467,400	99.89	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.332.000	5.285.500	99.13	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.534.000	7.500.000	99.55	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.997.900	99.96	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.587.700	6.580.500	99.89	100



	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan	2 Laporan	2 Laporan	4.475.300	4.363.800	97.51	100
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	5 Laporan	91.464.000	91.452.668	99.99	100
<b>Kegiatan</b>									
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>7.862.487.500</b>	<b>7.603.075.061</b>	<b>96.7</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji	65 Orang	65 Orang	7.793.024.500	7.536.097.607	96.7	100
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000	4.933.500	98.67	100
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi	6 Laporan	6 Laporan	15.000.000	14.858.000	99.05	100
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	44.463.000	42.185.954	94.88	100
	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	100	100
<b>Kegiatan</b>									
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>18.936.750</b>	<b>18.909.350</b>	<b>99.86</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	14.999.250	14.999.250	100	100

	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.937.500	3.910.100	99.3	100
<b>Kegiatan</b>									
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Keterpenuhan kebutuhan Pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>41.580.000</b>	<b>41.580.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	41,580,000	41,580,000	100	100
<b>Kegiatan</b>									
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>360.648.900</b>	<b>332.851.124</b>	<b>92.29</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	99.966.000	78.650.000	78.68	100
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	11.729.000	11.637.000	99.22	100
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3.900.000	3.900.000	100	100
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000	2,400,000	100	100
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	41.760.000	41.752.500	99.98	100
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	24 Laporan	24 Laporan	197.944.000	191.561.724	96.78	100
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	1 Dokumen	2,949,900	2,949,900	100	100
<b>Kegiatan</b>									

6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>742.277.460</b>	<b>732.270.330</b>	<b>98.65</b>	<b>100</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	118.790.000	98.99	100	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	1 Laporan	1 Laporan	622.277.460	613.480.330	98.59	100	
<b>Kegiatan</b>									
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>429.878.000</b>	<b>371.291.043</b>	<b>86.37</b>	<b>100</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	9 Unit	9 Unit	207.950.000	151.263.150	72.74	100	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	1 Unit	1 Unit	9.828.000	9.819.200	99.91	100	
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	23 Unit	23 Unit	12.100.000	12.100.000	100	100	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Tepelihara	2 Unit	2 Unit	200.000.000	198.108.693	99.05	100	
2	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk</b>	<b>98%</b>	<b>97,21</b>	<b>161,182,400</b>	<b>160,511,156</b>	<b>99.58</b>	<b>100</b>
			<b>Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</b>	<b>40%</b>	<b>50,12</b>				
			<b>Persentase penerbitan KTP</b>	<b>98%</b>	<b>97,21</b>				

		<b>Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>104,78</b>					
	<b>Kegiatan</b>								
<b>1</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>90.492.600</b>	<b>89.964.200</b>	<b>99.42</b>	<b>100</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b>								
1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	56.482.600	56.018.300	99.18	100	
2	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34.010.000	33.945.900	99.81	100	
	<b>Kegiatan</b>								
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>68.563.200</b>	<b>68.460.056</b>	<b>99.85</b>	<b>100</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b>								
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laopran	1 Laporan	1 Laporan	68.563.200	68.460.056	99.85	100	
	<b>Kegiatan</b>								
<b>3</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>2.126.600</b>	<b>2.086.900</b>	<b>98.13</b>	<b>100</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b>								
1	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.126.600	2.086.900	98.13	100	
<b>3</b>									

<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase Akta Kematian yang diterbitkan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>				
		<b>Persentase Bayi ber akte kelahiran</b>	<b>98%</b>	<b>98,30</b>				
		<b>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran</b>	<b>47%</b>	<b>54,18</b>				
		<b>Persentase Pasangan ber akte nikah</b>	<b>37%</b>	<b>0</b>	<b>275,021,300</b>	<b>267,634,544</b>	<b>97.31</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran</b>	<b>90,10%</b>	<b>97,62</b>				
		<b>Persentase penerbitan akta kelahiran</b>	<b>95%</b>	<b>97,62</b>				
<b>Kegiatan</b>								
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>216.245.900</b>	<b>209.844.444</b>	<b>97.04</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>								
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	43.172.800	43.102.200	99.84	100
2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	121.142.700	115.004.700	94.93	100
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	51.930.400	51.737.544	99.63	100
<b>Kegiatan</b>								
<b>2</b>	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>58.775.400</b>	<b>57.790.100</b>	<b>98.32</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>								

	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	58.775.400	57.790.100	98.32	100
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>150,059,800</b>	<b>145,849,620</b>	<b>97.19</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan</b>								
1	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Persentase Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>34.446.200</b>	<b>34.281.200</b>	<b>99.52</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34.446.200	34.281.200	99.52	100
<b>Kegiatan</b>									
2	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		<b>Persentase Kab/Kota/OPD/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>44.244.000</b>	<b>40.758.200</b>	<b>92.12</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.991.000	1.880.000	94.42	100
	2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42.253.000	38.878.200	92.01	100
<b>Kegiatan</b>									

3	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		<b>Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>71.369.600</b>	<b>70.810.220</b>	<b>99.22</b>	<b>100</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>								
	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	66.937.600	66.379.220	99.17	100
5	2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta	60 Orang	60 Orang	4.432.000	4.431.000	99.98	100
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>								
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Penyajian Profil Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>93,745,400</b>	<b>93,619,300</b>	<b>99.87</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan</b>								
	1	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>93.745.400</b>	<b>93.619.300</b>	<b>99.87</b>	<b>100</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>								
	1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>93.745.400</b>	<b>93.619.300</b>	<b>99.87</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>						<b>10,381,108,310</b>	<b>10,009,239,296</b>	<b>96.42</b>	<b>100</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kegiatan dalam mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 yang mengelola 5 Program, 16 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**, sebagaimana dapat di lihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	109,31%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Skala Provinsi	102,94%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	99,30%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian</b>		<b>103,85%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketiga capaian kinerja Sasaran Strategis sudah mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Capaian ini berada pada kriteria **Sangat Baik**” karena Capaian Kinerja Sasaran Strategis berada pada angka **91%** ke atas.



## 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan kedepan. Meskipun sebagian besar Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target dengan predikat sangat baik, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI serta stakeholder terkait lainnya.
2. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pendampingan dan pembinaan kepada instansi pelaksana di Kabuapten/Kota.
3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pencapaian target dokumen kependudukan dan pencatatan sipil khususnya di Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik itu di Provinsi ataupun di Kabupaten/Kota.

Demikian Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Makassar, 12 Februari 2024

**KEPALA DINAS,**



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE., MT**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660902 198810 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : **Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si**  
Jabatan : Pj.Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,

**Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si**  
Pj.Gubernur Sulawesi Selatan

Pihak Pertama,

**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Pangkat: Pembina Utama Madya  
Nip. 19660902 199810 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	80%
	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	85
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah		Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%
	Nilai SAKIP OPD	81	
	Persentase ASN nilai SKP kategori baik dan sangat baik	100%	
	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	100%	
		Persentase temuan material	0%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.701.009.410	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	161.182.400	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	275.021.300	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	150.059.800	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	93.745.400	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>10.381.108.310</b>	<b>APBD</b>

Pihak Kedua,



**Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si**  
Pj.Gubernur Sulawesi Selatan

Makassar, 03 November 2023  
Pihak Pertama,



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Pangkat: Pembina Utama Madya  
Nip. 19660902 199810 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A. Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : **Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,

**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Nip. 19660902 199810 1 001

Pihak Pertama,

**A. Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Nip. 19851014 200412 1 001

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan Aset Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik	100%
		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.701.099.410</b>	<b>APBD</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.290.800	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.862.487.500	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	18.936.750	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.580.000	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.648.900	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742.277.460	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.878.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>9.701.099.410</b>	<b>APBD</b>

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua.



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Nip. 19660902 199810 1 001

Pihak Pertama,



**A. Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Nip. 19851014 200412 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aswan Ansar, S.IP, M.AP**

Jabatan : Plt. Kabid. Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : **Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,

**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Nip. 19660902 199810 1 001

Pihak Pertama,

**ASWAN ANSAR, S.IP., M.AP**  
Nip. 19860113 200701 1 001

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pemanfaatan data Kependudukan	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	100%
		Persentase Penyajian Profil Kependudukan	100%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET.</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>150.059.800</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>34.446.200</b>	<b>APBD</b>
a	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	34.446.200	APBD
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>44.244.000</b>	<b>APBD</b>
a	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.991.000	APBD
b	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	42.253.000	APBD
<b>3</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>70.810.220</b>	<b>APBD</b>
a	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	66.937.600	APBD
b	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4.431.000	APBD

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>93.745.400</b>	<b>APBD</b>
1	Penyediaan Profil Kependudukan	93.745.400	APBD
a	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	93.745.400	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>243.805.200</b>	<b>APBD</b>

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,

**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Nip. 19660902 199810 1 001

Pihak Pertama,

**ASWAN ANSAR, S.IP., M.AP**  
Nip. 19860113 200701 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. Hj. A. Nuraeni, M. Pd**

Jabatan : Kabid. Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : **Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,

**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Nip. 19660902 199810 1 001

Pihak Pertama,

**Dra. Hj. A. Nuraeni, M. Pd**  
Nip. 19671231 199309 2 002

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya cakupan Tata Kelola Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	98%
		Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	100%
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%
		Persentase penerbitan KTP	98%
		Persentase Bayi ber akte kelahiran	98%
		Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	90,10%
		Persentase Pasangan ber akte nikah	37%
		Persentase penerbitan akta kelahiran	95,00%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	47%
		Persentase Akta Kematian yang diterbitkan	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>161.182.400</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>90.492.600</b>	<b>APBD</b>
a	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	56.482.600	APBD
b	Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	34.010.000	APBD
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>68.563.200</b>	<b>APBD</b>
a	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	68.563.200	APBD
<b>3</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>2.126.600</b>	<b>APBD</b>
a	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	2.126.600	APBD

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>275.021.300</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>216.245.900</b>	<b>APBD</b>
a	Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	43.172.800	APBD
b	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	121.142.700	APBD
c	Pemberian konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	51.930.400	APBD
<b>2</b>	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>58.775.400</b>	<b>APBD</b>
a	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	58.775.400	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>434.203.700</b>	<b>APBD</b>

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,

**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE, MT**  
Nip. 19660902 199810 1 001

Pihak Pertama,

**Dra. Hj. A. Nuraeni, M. Pd**  
Nip. 19671231 199309 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Zarkasyi Assagaf, S.STP**  
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Program

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : **A.Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,

**A.Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Nip. 19851014 200412 1 001

Pihak Pertama,

**Muhammad Zarkasyi Assagaf, S.STP**  
Nip.19910906 201507 1 001

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.290.800	APBD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.897.800	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.332.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.534.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.587.700	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.475.300	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.464.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>245.290.800</b>	<b>APBD</b>

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,



**A. Muqniwangsa, S. STP., M. Si**  
Nip. 19851014 200412 1 001

Pihak Pertama,



**Muhammad Zarkasyi Assaqaf, S.STP**  
Nip.19910906 201507 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sutrisno Adhy Putra, S.IP, MM**  
Jabatan : Kasubag. Umum, Kepegawaian Dan Hukum

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : **A.Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,

**A.Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Nip. 19851014 200412 1 001

Pihak Pertama,

**Sutrisno Adhy Putra, S.IP, MM**  
Nip. 198803162007011001

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

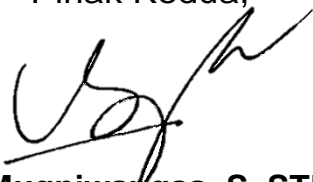
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatkan Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik dan Penurunan Temuan LHP	Persentase Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100%
		Persentase Keterpenuhan kebutuhan Pegawai	100%
		Persentase Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	33 Unit
		Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	34 Unit

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET.</b>
<b>I</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.936.750</b>	<b>APBD</b>
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.992.250	APBD
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.937.500	APBD
<b>II</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>41.580.000</b>	<b>APBD</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41.580.000	APBD
<b>III</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>360.648.900</b>	<b>APBD</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.966.000	APBD
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.729.000	APBD
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.900.000	APBD
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	APBD

5	Fasilitas Kunjungan Tamu	41.760.000	APBD
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.944.000	APBD
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.949.900	APBD
<b>IV</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>742.277.460</b>	<b>APBD</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	622.277.460	APBD
<b>V</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>429.878.000</b>	<b>APBD</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207.950.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.828.000	APBD
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.100.000	APBD
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>1.593.321.110</b>	<b>APBD</b>

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,



**A. Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Nip. 19851014 200412 1 001

Pihak Pertama,



**Sutrisno Adhy Putra, S.IP, MM**  
Nip. 198803162007011001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andi Nina Lerang, S. Sos, MM**

Jabatan : Kasubag. Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : **A.Mugniwangsa, S. STP., M. Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,

**A.Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Nip. 19851014 200412 1 001

Pihak Pertama,

**Andi Nina Lerang, S. Sos, MM**  
Nip. 19740224 199303 2 006

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

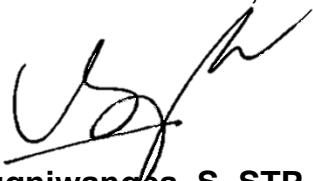
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu	100%

NO	KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.862.487.500</b>	<b>APBD</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.793.024.500	APBD
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	APBD
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.463.000	APBD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>7.862.487.500</b>	<b>APBD</b>

Makassar, 03 November 2023

Pihak Kedua,



**A. Mugniwangsa, S. STP., M. Si**  
Nip. 19851014 200412 1 001

Pihak Pertama,



**Andi Nina Lerang, S. Sos, MM**  
Nip. 19740224 199303 2 006



## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164  
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

### NOTA DINAS

Yth. : Gubernur Sulawesi Selatan Melalui Sekretaris Daerah Prov. Sulsel  
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel  
Tembusan : Bappelitbangda Prov. Sulsel  
Biro Pemerintahan Prov. Sulsel  
Tanggal : 23 Januari 2024  
Nomor : 800.1.14.2/193/DISDUKCAPIL  
Sifat : -  
Lampiran : 1 Eks  
Hal : Penyampaian Capaian Kinerja IKU dan IKK Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini menyampaikan hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dan data tersebut bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 dan Data Pelayanan 24 Kabupaten/kota per tanggal 31 Desember 2023, dengan ini **terlampir Data Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,  


**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.**

Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya/ IV/d  
NIP. 19660902 198810 1 001

Lampiran :  
 Nomor :

Indikator Kinerja Utama (IKU):

No	Indikator	Rumusan	Sumber	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan	Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik	Permenpan RB 14 Tahun 2017	85	87,45
2	Persentase Tata Kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan + Jumlah KIA yang diterbitkan + Jumlah penduduk lahir dan <u>memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan</u> Jumlah penduduk wajib KTP + Jumlah Anak usia 0 -17 tahun kurang sehari + Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	x100  DISDUKCAPIL	80%	85,07%
3	Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	Berdasarkan Kuesioner	DISDUKCAPIL	85	90
	Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	<u>Jumlah Permohonan Perjanjian Kerjasama(PKS)</u> Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diterbitkan	x100  DISDUKCAPIL	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci (IKK):

No	Indikator	Rumusan	Sumber	Target	Realisasi
1	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100$	PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	98%	97,26%
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah KPT ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100$	PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	98%	97,26%
3	Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah yang telah melakukan perekaman KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100$	DISDUKCAPIL	100%	104,78%
4	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia < 17 yang belum menikah dan ber KIA}}{\text{Jumlah penduduk usia < 17 dan belum menikah}} \times 100$	DISDUKCAPIL	40%	50,12%
5	Persentase bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}} \times 100$	PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	98%	98,30%
6	Persentase pasangan ber-Akta nikah yang dilaporkan	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100$	PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	37%	48,32%
7	Cakupan penerbitan akte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan}} \times 100$	PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	95%	97,62%
8	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk 0-17 tahun pada periode waktu yang sama}} \times 100$	DISDUKCAPIL	90,10 %	97,62%
9	Persentase kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Akta kelahiran keseluruhan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	DISDUKCAPIL	47%	54,18%

10	Persentase penerbitan Akta kematian yang dilaporkan	$\frac{\text{Jumlah Akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan akta kematian}}$	x100	DISDUKCAPIL	100%	100%
11	Persentase ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala provinsi	OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data <u>kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</u> OPD Provinsi yang telah melakukan perjanjian kerjasama	x100	PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020	100%	100%
12	Persentase penyediaan profil kependudukan	Tersedianya buku profil kependudukan skala provinsi		PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020	100%	100%

KEPALA DINAS,  
  
**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.**  
Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya/ IV/d  
NIP. 19660902 198810 1 001

**PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN) SEM II 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH AWAL (LK)	JUMLAH AWAL (PR)	JUMLAH AWAL (JML)	MEMILIKI (LK)	MEMILIKI (PR)	MEMILIKI (JML)	Persentase (%)
1	KEPULAUAN SELAYAR	69.907	72.193	142.100	33.069	32.169	65.238	45,91
2	BULUKUMBA	230.557	241.131	471.688	117.610	115.913	233.523	49,51
3	BANTAENG	104.602	107.021	211.623	67.366	67.190	134.556	63,58
4	JENEPONTO	207.496	212.627	420.123	103.175	100.432	203.607	48,46
5	TAKALAR	159.339	166.705	326.044	78.134	79.167	157.301	48,25
6	GOWA	396.130	403.869	799.999	196.833	194.391	391.224	48,90
7	SINJAI	135.661	137.898	273.559	92.660	89.126	181.786	66,45
8	BONE	400.508	420.002	820.510	208.111	208.787	416.898	50,81
9	MAROS	198.708	200.158	398.866	104.226	102.915	207.141	51,93
10	PANGKAJENE KEPULAUAN	175.700	182.146	357.846	99.559	98.407	197.966	55,32
11	BARRU	95.571	98.972	194.543	48.614	48.920	97.534	50,13
12	SOPPENG	116.455	124.500	240.955	94.729	100.920	195.649	81,20
13	WAJO	198.382	209.491	407.873	112.758	112.778	225.536	55,30
14	SIDENRENG RAPPANG	160.986	165.344	326.330	91.103	96.023	187.126	57,34
15	PINRANG	206.252	211.680	417.932	128.052	132.187	260.239	62,27
16	ENREKANG	117.519	113.782	231.301	57.586	56.995	114.581	49,54
17	LUWU	191.523	189.156	380.679	97.506	92.412	189.918	49,89
18	TANA TORAJA	132.284	125.617	257.901	92.613	87.607	180.220	69,88
19	LUWU UTARA	168.133	164.994	333.127	83.532	80.168	163.700	49,14
20	LUWU TIMUR	161.542	151.862	313.404	90.684	85.933	176.617	56,35
21	TORAJA UTARA	133.529	128.123	261.652	76.368	71.500	147.868	56,51
22	KOTA MAKASSAR	732.391	742.002	1.474.393	377.166	370.979	748.145	50,74
23	KOTA PARE PARE	79.753	80.556	160.309	63.348	63.443	126.791	79,09
24	KOTA PALOPO	88.693	88.833	177.526	45.314	44.366	89.680	50,52
	<b>TOTAL</b>	<b>4.661.621</b>	<b>4.738.662</b>	<b>9.400.283</b>	<b>2.560.116</b>	<b>2.532.728</b>	<b>5.092.844</b>	<b>54,18</b>

**PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN) SEM II 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	STATUS KAWIN (LK)	STATUS KAWIN (PR)	STATUS KAWIN (JML)	AKTA KAWIN (MEMILIKI)	AKTA KAWIN (BLM MEMILIKI)	AKTA KAWIN (%)
1	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	31.374	32.034	63.408	40.096	23.312	63,23
2	KAB. BULUKUMBA	116.290	121.201	237.491	68.018	169.473	28,64
3	KAB. BANTAENG	52.095	53.638	105.733	56.804	48.929	53,72
4	KAB. JENEPONTO	102.107	106.105	208.212	46.283	161.929	22,23
5	KAB. TAKALAR	79.967	83.112	163.079	72.090	90.989	44,21
6	KAB. GOWA	196.098	204.480	400.578	159.079	241.499	39,71
7	KAB. SINJAI	62.137	63.765	125.902	52.637	73.265	41,81
8	KAB. BONE	188.002	194.673	382.675	173.070	209.605	45,23
9	KAB. MAROS	93.081	95.184	188.265	89.399	98.866	47,49
10	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	80.264	82.161	162.425	107.190	55.235	65,99
11	KAB. BARRU	44.122	46.261	90.383	49.653	40.730	54,94
12	KAB. SOPPENG	55.307	56.923	112.230	83.260	28.970	74,19
13	KAB. WAJO	95.537	97.465	193.002	112.740	80.262	58,41
14	KAB. SIDENRENG RAPPANG	78.817	80.225	159.042	54.566	104.476	34,31
15	KAB. PINRANG	95.289	102.989	198.278	82.505	115.773	41,61
16	KAB. ENREKANG	46.310	48.960	95.270	50.708	44.562	53,23
17	KAB. LUWU	79.157	82.516	161.673	72.994	88.679	45,15
18	KAB. TANA TORAJA	50.125	51.746	101.871	64.728	37.143	63,54
19	KAB. LUWU UTARA	72.758	74.556	147.314	57.239	90.075	38,86
20	KAB. LUWU TIMUR	70.792	70.193	140.985	80.831	60.154	57,33
21	KAB. TORAJA UTARA	49.886	53.933	103.819	56.888	46.931	54,8
22	KOTA MAKASSAR	312.833	331.108	643.941	362.097	281.844	56,23
23	KOTA PAREPARE	32.772	34.183	66.955	57.347	9.608	85,65
24	KOTA PALOPO	36.630	37.822	74.452	40.528	33.924	54,44
	<b>TOTAL</b>	<b>2.121.750</b>	<b>2.205.233</b>	<b>4.326.983</b>	<b>2.090.750</b>	<b>2.236.233</b>	<b>48,32</b>



**PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN) SEM II 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH AWAL (LK)	JUMLAH AWAL (PR)	JUMLAH AWAL (JML)	MEMILIKI (LK)	MEMILIKI (PR)	MEMILIKI (JML)	Persentase (%)
1	KEPULAUAN SELAYAR	20.969	19.481	40.450	19.037	17.939	36.976	91,41
2	BULUKUMBA	66.277	62.420	128.697	65.341	61.558	126.899	98,60
3	BANTAENG	30.321	29.251	59.572	29.935	28.846	58.781	98,67
4	JENEPONTO	68.102	64.140	132.242	65.431	61.704	127.135	96,14
5	TAKALAR	51.305	48.222	99.527	49.487	46.575	96.062	96,52
6	GOWA	120.929	112.933	233.862	120.256	112.325	232.581	99,45
7	SINJAI	41.124	38.182	79.306	41.115	38.174	79.289	99,98
8	BONE	119.492	113.017	232.509	115.386	109.366	224.752	96,66
9	MAROS	64.711	60.052	124.763	60.471	56.074	116.545	93,41
10	PANGKAJENE KEPULAUAN	58.221	55.041	113.262	58.103	54.936	113.039	99,80
11	BARRU	28.819	27.113	55.932	27.499	25.909	53.408	95,49
12	SOPPENG	29.962	27.907	57.869	29.777	27.757	57.534	99,42
13	WAJO	58.001	54.222	112.223	57.916	54.151	112.067	99,86
14	SIDENRENG RAPPANG	49.845	46.662	96.507	49.379	46.216	95.595	99,05
15	PINRANG	64.967	60.514	125.481	64.606	60.170	124.776	99,44
16	ENREKANG	36.286	33.737	70.023	34.159	31.929	66.088	94,38
17	LUWU	62.262	57.348	119.610	61.313	56.547	117.860	98,54
18	TANA TORAJA	41.374	37.858	79.232	39.535	36.201	75.736	95,59
19	LUWU UTARA	52.879	49.689	102.568	50.262	47.269	97.531	95,09
20	LUWU TIMUR	51.743	48.016	99.759	50.457	46.867	97.324	97,56
21	TORAJA UTARA	45.634	42.178	87.812	42.872	39.703	82.575	94,04
22	KOTA MAKASSAR	235.192	218.782	453.974	231.119	215.077	446.196	98,29
23	KOTA PARE PARE	26.503	24.821	51.324	26.493	24.806	51.299	99,95
24	KOTA PALOPO	29.071	27.232	56.303	28.793	26.994	55.787	99,08
	<b>TOTAL</b>	<b>1.453.989</b>	<b>1.358.818</b>	<b>2.812.807</b>	<b>1.418.742</b>	<b>1.327.093</b>	<b>2.745.835</b>	<b>97,62</b>

**PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN) SEM II 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH AWAL (LK)	JUMLAH AWAL (PR)	JUMLAH AWAL (JML)	MEMILIKI (LK)	MEMILIKI (PR)	MEMILIKI (JML)	Persentase (%)
1	KEPULAUAN SELAYAR	5.761	5.186	10.947	5.534	4.958	10.492	95,84
2	BULUKUMBA	18.415	17.328	35.743	18.113	17.054	35.167	98,39
3	BANTAENG	10.147	9.649	19.796	9.890	9.385	19.275	97,37
4	JENEPONTO	20.685	19.295	39.980	18.712	17.513	36.225	90,61
5	TAKALAR	16.937	15.850	32.787	16.861	15.812	32.673	99,65
6	GOWA	37.180	34.456	71.636	37.087	34.355	71.442	99,73
7	SINJAI	12.192	11.356	23.548	12.191	11.356	23.547	100,00
8	BONE	34.632	32.760	67.392	33.155	31.394	64.549	95,78
9	MAROS	21.554	19.978	41.532	21.492	19.910	41.402	99,69
10	PANGKAJENE KEPULAUAN	18.226	17.071	35.297	18.204	17.055	35.259	99,89
11	BARRU	8.280	7.849	16.129	8.205	7.779	15.984	99,10
12	SOPPENG	8.445	7.742	16.187	8.357	7.699	16.056	99,19
13	WAJO	16.151	14.996	31.147	16.125	14.978	31.103	99,86
14	SIDENRENG RAPPANG	15.565	14.361	29.926	15.367	14.162	29.529	98,67
15	PINRANG	19.069	17.485	36.554	18.966	17.399	36.365	99,48
16	ENREKANG	9.520	8.829	18.349	9.368	8.685	18.053	98,39
17	LUWU	17.868	16.336	34.204	17.499	15.993	33.492	97,92
18	TANA TORAJA	10.467	9.661	20.128	10.255	9.420	19.675	97,75
19	LUWU UTARA	15.737	14.718	30.455	15.637	14.653	30.290	99,46
20	LUWU TIMUR	16.835	15.415	32.250	16.596	15.212	31.808	98,63
21	TORAJA UTARA	11.831	10.731	22.562	11.010	10.000	21.010	93,12
22	KOTA MAKASSAR	68.116	63.516	131.632	67.650	63.066	130.716	99,30
23	KOTA PARE PARE	8.624	7.902	16.526	8.621	7.900	16.521	99,97
24	KOTA PALOPO	9.338	8.578	17.916	9.288	8.541	17.829	99,51
	<b>TOTAL</b>	<b>431.575</b>	<b>401.048</b>	<b>832.623</b>	<b>424.183</b>	<b>394.279</b>	<b>818.462</b>	<b>98,30</b>

**PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK) SEM II 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	USIA 0-17 (LK)	USIA 0-17 (PR)	USIA 0-17 (JML)	MEMILIKI (LK)	MEMILIKI (PR)	MEMILIKI (JML)	KEPEMILIKAN (%)
1	KEPULAUAN SELAYAR	19.543	18.046	37.589	10.354	9.973	20.327	54,08
2	BULUKUMBA	63.912	59.757	123.669	28.255	27.946	56.201	45,44
3	BANTAENG	29.132	27.962	57.094	14.567	14.208	28.775	50,4
4	JENEPONTO	64.361	60.560	124.921	27.349	25.226	52.575	42,09
5	TAKALAR	49.765	46.552	96.317	13.236	12.840	26.076	27,07
6	GOWA	117.651	109.517	227.168	47.127	43.977	91.104	40,1
7	SINJAI	38.756	35.882	74.638	29.380	27.860	57.240	76,69
8	BONE	112.566	106.416	218.982	49.973	48.001	97.974	44,74
9	MAROS	63.138	58.267	121.405	19.020	17.500	36.520	30,08
10	PANGKAJENE KEPULAUAN	54.947	51.778	106.725	42.876	40.717	83.593	78,33
11	BARRU	27.057	25.469	52.526	11.906	11.321	23.227	44,22
12	SOPPENG	28.083	26.071	54.154	18.615	17.855	36.470	67,34
13	WAJO	54.810	51.122	105.932	34.013	33.032	67.045	63,29
14	SIDENRENG RAPPANG	47.434	44.307	91.741	21.503	20.704	42.207	46,01
15	PINRANG	61.708	57.235	118.943	25.147	23.828	48.975	41,18
16	ENREKANG	33.641	31.225	64.866	13.511	12.879	26.390	40,68
17	LUWU	58.623	53.884	112.507	20.021	18.753	38.774	34,46
18	TANA TORAJA	38.226	34.965	73.191	21.880	20.178	42.058	57,46
19	LUWU UTARA	49.439	46.391	95.830	19.623	18.817	38.440	40,11
20	LUWU TIMUR	50.122	46.348	96.470	26.247	24.681	50.928	52,79
21	TORAJA UTARA	42.847	39.542	82.389	18.336	17.211	35.547	43,15
22	KOTA MAKASSAR	220.881	205.320	426.201	134.786	127.182	261.968	61,47
23	KOTA PARE PARE	25.162	23.496	48.658	23.001	21.663	44.664	91,79
24	KOTA PALOPO	28.236	26.350	54.586	15.097	14.315	29.412	53,88
	<b>TOTAL</b>	<b>1.380.040</b>	<b>1.286.462</b>	<b>2.666.502</b>	<b>685.823</b>	<b>650.667</b>	<b>1.336.490</b>	<b>50,12</b>

**PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (KEPEMILIKAN KTP) SEM II 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	WKTP DINAMIS	KEPEMILIKAN KTP	PRR	Persentase (%)
1	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	102.330	96.966	453	94,76
2	KAB. BULUKUMBA	350.327	340.236	8.741	97,12
3	KAB. BANTAENG	154.259	153.702	539	99,64
4	KAB. JENEPONTO	294.225	275.838	2.855	93,75
5	KAB. TAKALAR	231.150	228.279	1.631	98,76
6	KAB. GOWA	576.246	570.812	1.511	99,06
7	KAB. SINJAI	199.677	193.251	4.990	96,78
8	KAB. BONE	606.715	587.950	9.082	96,91
9	KAB. MAROS	278.173	269.643	6.716	96,93
10	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	251.529	246.875	486	98,15
11	KAB. BARRU	142.551	140.619	1.056	98,64
12	KAB. SOPPENG	187.177	185.668	584	99,19
13	KAB. WAJO	303.094	299.022	1.057	98,66
14	KAB. SIDENRENG RAPPANG	235.642	229.376	3.361	97,34
15	KAB. PINRANG	300.728	293.758	4.836	97,68
16	KAB. ENREKANG	165.237	156.719	4.654	94,84
17	KAB. LUWU	269.384	262.510	2.754	97,45
18	KAB. TANA TORAJA	182.995	175.331	2.155	95,81
19	KAB. LUWU UTARA	233.723	226.687	1.863	96,99
20	KAB. LUWU TIMUR	218.297	215.722	1.334	98,82
21	KAB. TORAJA UTARA	180.979	177.670	1.229	98,17
22	KOTA MAKASSAR	1.045.127	1.006.370	12.515	96,29
23	KOTA PAREPARE	111.549	110.670	694	99,21
24	KOTA PALOPO	125.488	117.820	3.362	93,89
	<b>TOTAL</b>	<b>6.746.602</b>	<b>6.561.494</b>	<b>78.458</b>	<b>97,26</b>

**PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (PEREKAMAN KTP) SEM I 2023 + LAPORAN YANANAN**

NO	KABUPATEN/KOTA	WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	Persentase (%)
1	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	105.060	108.080	102.87%
2	KAB. BULUKUMBA	346.416	376.988	108.83%
3	KAB. BANTAENG	151.570	155.216	102.41%
4	KAB. JENEPONTO	298.095	299.736	100.55%
5	KAB. TAKALAR	228.631	243.714	106.60%
6	KAB. GOWA	569.486	595.425	104.55%
7	KAB. SINJAI	199.407	213.084	106.86%
8	KAB. BONE	604.394	639.752	105.85%
9	KAB. MAROS	275.327	289.779	105.25%
10	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	251.500	268.700	106.84%
11	KAB. BARRU	142.403	153.450	107.76%
12	KAB. SOPPENG	188.256	210.443	111.79%
13	KAB. WAJO	302.210	329.717	108.98%
14	KAB. SIDENRENG RAPPANG	234.210	251.181	107.25%
15	KAB. PINRANG	298.580	319.445	106.99%
16	KAB. ENREKANG	167.020	169.029	101.20%
17	KAB. LUWU	268.071	276.014	102.96%
18	KAB. TANA TORAJA	186.205	188.748	101.37%
19	KAB. LUWU UTARA	239.078	249.149	104.21%
20	KAB. LUWU TIMUR	215.619	232.908	108.02%
21	KAB. TORAJA UTARA	179.042	191.345	106.87%
22	KOTA MAKASSAR	1.057.136	1.061.234	100.39%
23	KOTA PAREPARE	111.653	121.419	108.75%
24	KOTA PALOPO	131.130	129.220	98.54%
	<b>TOTAL</b>	<b>6.750.843</b>	<b>7.073.776</b>	<b>104.78%</b>



**TERIMA KASIH**